

**OBLIGATION OF WTO MEMBER STATE ON THE COMPLIANCE
TOWARD THE PANEL REPORT ON QUANTITATIVE RESTRICTION
PRINCIPLE AND RIGHT TO PROTECT NATIONAL INTEREST: CASE
STUDY OF MINISTRY OF AGRICULTURE REGULATION NUMBER
23/2018 PURSUANT TO THE PANEL REPORT OF INDONESIA-
CHICKEN CASE**

ALARD TIRTA ANDIKA¹ AND M. HAWIN²

ABSTRACT

This legal research aimed to analyzing the method applied by the Ministry of Agriculture Regulation Number 23 Year 2018 to comply with the Panel Report for the Indonesia-Chicken case, mainly on the violation related to the Quantitative Restriction Principle. Furthermore, the legal research also intended to find the solution on bridging the protection of Indonesia's national interest on chicken industry and to comply with the Quantitative Restriction Principle of WTO.

The following legal research conducted through normative-empirical approach which dominantly relies on literature study and complemented with field research in order to provide further insight, mainly from the stance of Government of Indonesia and chicken industry practitioner.

From the findings, this Legal Research concludes that the current structure of Ministry of Agriculture Regulation Number 23 Year 2018 already complies with the Panel Report on the Quantitative Restriction Principle. This condition achieved mainly through accomodating provisions which less restrictive compared to the previous regulation while maintaining sufficient protection for human health. Furthermore, related to the Laws which regulates the national interests of chicken industry in Indonesia there are several violations on Quantitative Restriction Principle. Henceforth, the steps that can be taken mainly to remove the provisions which considered contradict the Quantitative Restriction Principle and imposing more transparent tariff based barrier or Countervailing Duties in order to protect the national chicken industry.

Keyword: WTO, Chicken Industry, Quantitative Restriction

¹ Student at the Undergraduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

² Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

**KEWAJIBAN NEGARA ANGGOTA WTO TERKAIT KEPATUHAN
TERHADAP PANEL REPORT DALAM PRINSIP RESTRIKSI
KUANTITATIF DAN HAK UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN
NASIONAL: STUDI KASUS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 23/2018 TERHADAP PANEL REPORT DALAM KASUS
INDONESIA-CHICKEN**

ALARD TIRTA ANDIKA¹ DAN M. HAWIN²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis metode yang diterapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 untuk mematuhi Panel Report pada kasus Indonesia-Chicken, terutama pada pelanggaran terhadap Prinsip Restriksi Kuantitatif. Kemudian, penelitian hukum ini juga ditujukan mencari solusi untuk menghubungkan antara perlindungan terhadap kepentingan Indonesia dalam industri ayam dan kepatuhan terhadap Prinsip Restriksi Kuantitatif.

Penelitian Hukum ini menerapkan pendekatan normatif-empiris yang lebih mengandalkan studi pustaka dan dilengkapi dengan penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas, terutama dari sudut pandang Pemerintah Indonesia dan pelaku industri ayam.

Dalam temuannya, Penelitian Hukum ini menyimpulkan bahwa struktur dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 sudah mematuhi Panel Report terkait dengan Prinsip Restriksi Kuantitatif. Keadaan ini dapat dicapai dengan memberikan aturan yang bersifat tidak terlalu membatasi dibandingkan dengan aturan sebelumnya meskipun tetap mempertahankan perlindungan yang cukup terkait dengan isu kesehatan manusia. Berikutnya, terkait dengan Undang-Undang yang mengatur kepentingan nasional pada industri ayam di Indonesia terdapat beberapa pelanggaran dalam Prinsip Restriksi Kuantitatif. Sehingga, langkah yang dapat dilakukan secara umum adalah dengan menghapus aturan yang dianggap bertentangan dengan Prinsip Restriksi Kuantitatif dan menerapkan penghalang berbasis bea cukai ataupun Countervailing Duties.

Kata Kunci: WTO, Industri Ayam, Restriksi Kuantitatif

¹ Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada